

Batam, 14 April 2026

No : 005/KBtm/Dir/IV/2026

Lamp : 1 (satu) set

Kepada Yth :

- DPP Perbarindo Pusat
- DPP Perbarindo Kepulauan Riau
- Majalah Media BPR



Perihal : Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Kepri Batam Tahun 2025.

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah pasal 102, bersama ini kami lampirkan Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Kepri Batam Tahun 2025.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PT. BPR KEPRI BATAM



KEPRI BATAM
PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT

Medi
Direktur Utama

Elisabet
Direktur

Batam, 14 April 2026

No : 004/KBtm/Dir/IV/2026

Lamp : 1 (satu) set

Kepada Yth,
Otoritas Jasa Keuangan
Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kepulauan Riau.
Jl. Ahmad Yani, Komp Kara Junction
Blok C No. 1 – 2 Taman Baloi
B A T A M

Perihal : Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Kepri Batam Tahun 2025.

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah pasal 102, bersama ini kami lampirkan Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Kepri Batam Tahun 2025.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PT. BPR KEPRI BATAM



Medi
Direktur Utama



Elisabet
Direktur

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

PT Bank Perekonomian Rakyat Kepri Batam

Pelaporan

Laporan Tahunan Bank Perekonomian Rakyat

Nomor Referensi

1040343-1-LTBPRK-R-A-20251231-010201-602598-24042026152040

Periode Data

2025

User ID Petugas Pelaporan

reniveronika28@gmail.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

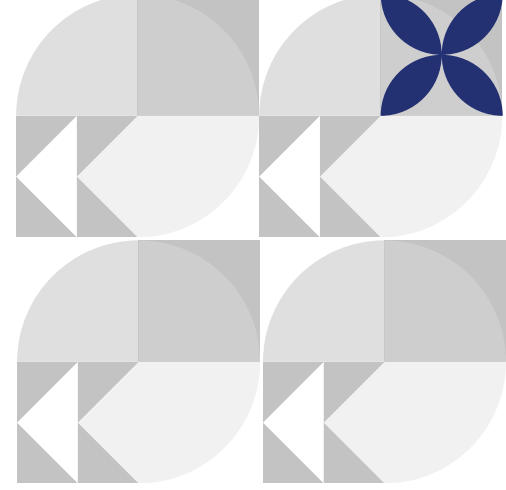
29 / 29

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2026-04-24 15:20:40



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.



LAPORAN

TRANSPARANSI PELAKSANAAN

TATA KELOLA – 2025



LEMBAR PERSETUJUAN

LAPORAN TRANSPARANSI TATA KELOLA

PT. BPR KEPRI BATAM

TAHUN 2025

Sehubungan dengan telah disusunnya “Laporan Transparansi Tata Kelola PT. BPR Kepri Batam Tahun 2025”, dengan ini kami selaku Komisaris dan Direksi PT. BPR Kepri Batam menyetujui dan mengesahkan laporan tersebut.

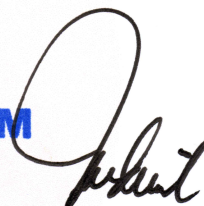
Batam, 09 April 2026
PT. BPR Kepri Batam



Medi
Direktur Utama



PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
KEPRI BATAM



Iskandar Itan
Komisaris Utama

DAFTAR ISI

A. Pendahuluan	1
B. Ringkasan Hasil Penilaian (<i>Self Assessment</i>) atas Penerapan Tata Kelola	2
C. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola	3
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	3
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris	7
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	8
D. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR	9
1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR.....	9
2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR	9
E. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain	9
1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain.....	9
2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain	9
F. Hubungan Keuangan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR	10
1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR	10
2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR	10
G. Hubungan Keluarga Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR	10
1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR	10
2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR.....	10
H. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS	10
I. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah	11
J. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris dalam 1 (satu) Tahun	11
K. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris	12
L. Jumlah Penyimpangan Internal (<i>Internal Fraud</i>)	12
M. Permasalahan Hukum yang Dihadapi	13
N. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan	13
O. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Lain	13
P. Penutup	13

A. Pendahuluan

Dalam rangka mewujudkan industri perbankan yang sehat, transparan, dan berintegritas, penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) merupakan landasan utama bagi PT. BPR Kepri Batam dalam menjalankan kegiatan usaha secara berkelanjutan. Penerapan tata kelola yang efektif tidak hanya bertujuan untuk memenuhi ketentuan regulator, namun juga sebagai upaya strategis dalam meningkatkan kinerja, memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholders*), serta menjaga stabilitas dan ketahanan usaha Bank.

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2025 ini mengacu pada ketentuan yang berlaku, antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2024. Laporan ini disusun sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan seluruh pemangku kepentingan atas pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola selama periode tahun buku 2025.

Sepanjang tahun 2025, PT. BPR Kepri Batam secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang meliputi transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*) dalam seluruh aspek operasional dan pengambilan keputusan. Implementasi prinsip-prinsip tersebut tercermin dalam struktur organisasi yang memadai, pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris, efektivitas peran Direksi, serta keberadaan fungsi pendukung seperti Audit Intern, Kepatuhan termasuk APU dan PPT, serta Manajemen Risiko dan Anti *Fraud*.

Dalam pelaksanaannya, BPR Kepri Batam senantiasa melakukan penguatan tata kelola secara berkelanjutan, termasuk melalui peningkatan kualitas kebijakan internal, penguatan sistem pengendalian intern, serta pengembangan kompetensi sumber daya manusia. Sejalan dengan rencana strategis Bank, termasuk konsolidasi/peleburan BPR yang sedang dipersiapkan, penerapan tata kelola yang baik menjadi faktor kunci dalam memastikan proses transformasi berjalan secara efektif, terstruktur, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, penguatan tata kelola tidak hanya menjadi kewajiban kepatuhan, namun juga menjadi fondasi dalam mendukung integrasi usaha dan penciptaan nilai jangka panjang.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kualitas penerapan tata kelola PT. BPR Kepri Batam selama tahun 2025, sekaligus menjadi dasar evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kinerja dan daya saing BPR di masa yang akan datang.

B. Ringkasan Hasil Penilaian (*Self Assessment*) atas Penerapan Tata Kelola

Alamat	: Komplek Pertokoan Palm Spring Blok D2 No.1, Batam
Nomor Telepon	: 0778-464555
Penjelasan Umum	<p>PT. Bank Perekonomian Rakyat Kepri Batam yang selanjutnya disebut sebagai Bank Perekonomian yang mengemban visi menjadi BPR yang sehat dan produktif dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat golongan mikro dan kecil di wilayah Batam dengan misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjalankan aktivitas BPR dengan menyalurkan kredit kepada masyarakat golongan mikro dan kecil untuk menunjang peningkatan ekonomi rakyat kecil. 2. Memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah melalui Service Quality dan didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten di bidangnya, dan 3. Membina jaringan kerjasama yang saling menguntungkan yang dilandasi rasa saling percaya. <p>Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola pada industri perbankan berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbukaan (<i>transparency</i>), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. 2. Akuntabilitas (<i>accountability</i>), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. 3. Pertanggungjawaban (<i>responsibility</i>), yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat. 4. Independensi (<i>independency</i>), yaitu pengelolaan BPR secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. 5. Kewajaran (<i>fairness</i>), yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan. <p>Selain mengacu pada visi, misi perusahaan, BPR Kepri Batam juga mengimplementasikan seluruh kegiatan usaha berdasarkan budaya perusahaan.</p>
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Tata Kelola	: 1 (Sangat Baik)
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Tata Kelola	: Berdasarkan analisis penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) terhadap Penerapan Tata Kelola BPR dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Tata Kelola BPR Kepri Batam secara keseluruhan telah dilaksanakan dengan predikat komposit Sangat Baik, yang terlihat dari proses dan hasil penerapan Tata Kelola seperti tidak terdapat benturan kepentingan, kejadian fraud, dan selalu berupaya melakukan pengkinian kebijakan secara bertahap sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mempertahankan tata kelola BPR sesuai prinsip 5 lima pilar.

C. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1	<p>Nama : Medi</p> <p>Jabatan : Direktur Utama</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab : a. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR Kepri Batam.</p> <p>b. Mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam anggaran dasar perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>c. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.</p> <p>d. Menerapkan tata kelola yang baik pada setiap kegiatan usaha bank di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>e. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari auditor internal, auditor eksternal (KAP), Dewan Komisaris, OJK maupun otoritas lain.</p> <p>f. Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern, fungsi manajemen risiko dan fungsi kepatuhan.</p> <p>g. Memastikan kuantitas SDM serta adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab antar unit kerja yang memadai dan disertai pengembangan kualitas sdm melalui pendidikan dan pelatihan pada setiap jenjang organisasi.</p> <p>h. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>i. Menyampaikan kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.</p> <p>j. Menyediakan data dan informasi secara lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.</p> <p>k. Bertanggung jawab atas pedoman dan tata tertib kerja yang mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat.</p> <p>l. Menyusun garis kebijakan Bank, arah bisnis Bank, rencana anggaran pendapatan dan belanja perusahaan, menentukan strategi yang menjamin profitabilitas dan perkembangan Perseroan.</p> <p>m. Menerapkan manajemen risiko serta mengembangkan budaya manajemen risiko secara konsisten pada seluruh jenjang organisasi agar pertumbuhan aset tetap dalam kondisi sehat dan bank dapat tumbuh secara berkelanjutan.</p> <p>n. Bertanggung jawab dalam menghasilkan pendapatan secara optimal dengan menetapkan strategi pengembangan bisnis dari segi <i>lending</i>, <i>funding</i>, dan kerjasama pihak eksternal untuk tujuan pencapaian target bisnis bank.</p>

2	Nama	: Elisabet
	Jabatan	: Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab	: <ul style="list-style-type: none"> a. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR Kepri Batam. b. Mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam anggaran dasar perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. c. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen. d. Menerapkan tata kelola yang baik pada setiap kegiatan usaha bank di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. e. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari auditor internal, auditor eksternal (KAP), Dewan Komisaris, OJK maupun otoritas lain. f. Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern, fungsi manajemen risiko dan fungsi kepatuhan. g. Memastikan kuantitas SDM serta adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab antar unit kerja yang memadai dan disertai pengembangan kualitas sdm melalui pendidikan dan pelatihan pada setiap jenjang organisasi. h. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan. i. Menyampaikan kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai. j. Menyediakan data dan informasi secara lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris. k. Bertanggung jawab atas pedoman dan tata tertib kerja yang mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat. l. Menyusun garis kebijakan Bank, arah bisnis Bank, rencana anggaran pendapatan dan belanja perusahaan, menentukan strategi yang menjamin profitabilitas dan perkembangan Perseroan. m. Menerapkan manajemen risiko serta mengembangkan budaya manajemen risiko secara konsisten pada seluruh jenjang organisasi agar pertumbuhan aset tetap dalam kondisi sehat dan bank dapat tumbuh secara berkelanjutan. n. Bertanggung jawab memastikan seluruh kegiatan operasional Bank terkait sistem, prosedur, dan teknologi informasi berjalan dengan efektif dan efisien serta sesuai dengan prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Bank maupun regulator.

Adapun tindak lanjut Direksi atas rekomendasi dari Dewan Komisaris yang disampaikan melalui Rapat Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

a. Penguatan Manajemen Risiko dan Kualitas Kredit

Direksi melakukan penguatan manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit melalui pendekatan analisis kredit berbasis risiko, pengawasan portofolio kredit secara berkala, serta diversifikasi sektor pembiayaan guna meminimalkan konsentrasi risiko dan menjaga kualitas aset produktif. Efektivitas implementasi tersebut tercermin antara lain dari kemampuan Bank dalam menjaga rasio kredit bermasalah (NPL) Gross dalam batas yang dapat ditoleransi $\leq 5\%$, kecukupan pembentukan CKPN terhadap NPL 100%, konsistensi melakukan peninjauan portofolio kredit debitur-debitur besar secara periodic, serta pertumbuhan kredit sektor terdiversifikasi yaitu sebesar 13,94% pada periode ini, sehingga kredit terbesar tidak dominan terhadap satu sektor tertentu.

b. Optimalisasi Implementasi APU, PPT, dan PPPSPM

Direksi memastikan implementasi program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal berjalan secara efektif melalui pelaksanaan CDD dan EDD berbasis risiko, pengkinian data nasabah secara periodik, serta peningkatan kualitas pemantauan dan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan sesuai dengan ketentuan regulator. Pelaksanaan program tersebut selalu dievaluasi melalui hasil pengawasan internal dan eksternal untuk memastikan tidak terdapat pelanggaran yang material, hal tersebut tercermin dari kelengkapan CDD/EDD terlaksana 100% untuk nasabah berisiko tinggi, Pengkinian data nasabah (KYC review) $\geq 100\%$, Ketepatan waktu pelaporan LTKM/TKM ke regulator: 100% tepat waktu, serta tidak terdapat temuan audit terkait APU PPT pada periode pelaporan.

c. Penguatan Tata Kelola Perusahaan (GCG)

Direksi terus memperkuat penerapan tata kelola perusahaan yang baik melalui peningkatan kualitas dan ketepatan waktu pelaporan keuangan yang akuntabel dan transparan, penyesuaian struktur organisasi sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan bisnis, serta pengkinian kebijakan dan prosedur internal guna mendukung efektivitas pengendalian internal. Direksi memastikan bahwa seluruh organ perusahaan menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara efektif sesuai transparansi, akuntabilitas, prinsip tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Hal ini tercermin dari peringkat komposit GCG minimal 2 (kategori baik), tidak ada temuan keterlambatan pelaporan yaitu ketepatan waktu memenuhi laporan regulator 100%, persentase kebijakan yang diperbaharui sesuai ketentuan $\geq 95\%$, pemenuhan struktur organisasi 100%.

d. Percepatan Tindak Lanjut Temuan Audit

Direksi berkomitmen untuk mendokumentasikan seluruh audit temuan, baik internal maupun eksternal, secara bertahap dan terukur melalui penyusunan rencana aksi yang jelas, menetapkan target waktu penyelesaian, serta memantau kemajuan secara berkala hingga seluruh temuan dinyatakan selesai (tertutup). Direksi memastikan tidak terdapat temuan signifikan berlarut tanpa penyelesaian dari penyelesaian temuan audit dan telah diselesaikan sesuai target waktu, serta tidak ada temuan luar biasa.

e. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

Direksi melaksanakan program pengembangan SDM secara berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan yang terstruktur, berbasis kompetensi dan kebutuhan organisasi, termasuk peningkatan kapasitas di bidang risiko manajemen, pemenuhan, dan layanan nasabah. Implementasinya, Pada periode ini terdapat beberapa pengkinian maupun kebijakan baru yang telah disosialisasikan oleh masing-masing pimpinan unit kerja guna memastikan pemahaman yang lebih komprehensif serta konsistensi penerapan kebijakan di unit kerja-nya. Selain itu, Direksi juga memastikan tersedianya SDM yang memadai dan kompeten untuk mendukung kegiatan operasional dan pengendalian internal Bank. Realisasi yang telah dilakukan tercermin dari pelatihan per karyawan ≥ 3 kali/tahun dan pada periode pelaporan sudah mengikutsertakan karyawan dalam pendidikan dan pelatihan sebanyak 73 kali sesuai dengan rencana pendidikan dan pelatihan, persentase kehadiran karyawan dalam mengikuti pelatihan diatas 90%, *briefing* karyawan dari setiap pimpinan unit kerja dilakukan minimal 1 kali pertemuan/minggu, serta tingkat kompetensi jabatan diatas 85%.

f. Strategi Bisnis dalam RBB

Direksi menyusun dan mengimplementasikan strategi bisnis yang *prudent* dan berimbang dalam Rencana Bisnis Bank (RBB), dengan menitikberatkan pada keseimbangan antara pertumbuhan kredit, perbaikan kualitas aset, dan penguatan likuiditas serta permodalan guna mencegah penghentian usaha. Pelaksanaan strategi tersebut dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal serta selalu mengacu pada ketentuan regulator yang berlaku. Pada periode ini, realisasi pertumbuhan kredit sesuai RBB mencapai 89,37. Indikator kinerja utama menunjukkan kondisi yang sehat dan terkendali, antara lain Rasio LDR yang berada dalam rentang risiko rendah sebesar 91,77% dan NPL net yang tetap terjaga sebesar 3,30%, serta ROA yang mencatatkan kinerja positif dan meningkat sebesar 2,94%. Selain itu, efisiensi operasional juga terus membaik yang tercermin dari penurunan Rasio BOPO secara bertahap hingga mencapai 78,70% pada periode 31 Desember 2025.

g. Penyelesaian dan Pengelolaan AYDA

Direksi melakukan upaya penyelesaian Aset Yang Diambil Alih (AYDA) melalui strategi penjualan aset secara bertahap dan optimal, disertai dengan pengendalian dampaknya terhadap kondisi keuangan dan permodalan Bank. Direksi memastikan upaya-upaya penjualan aset AYDA agar tidak berpengaruh signifikan terhadap permodalan yaitu dengan melakukan informasi penjualan di media sosial, kerja sama dengan agen, penawaran langsung (*door-to-door*), serta penggunaan media promosi berupa brosur dan spanduk. Posisi permodalan tetap terjaga dan berada dalam batas yang memadai. Hal ini didukung oleh kemampuan Bank dalam memperkuat struktur permodalan secara berkelanjutan melalui peningkatan laba dari kinerja operasional, pengendalian kualitas aset secara konsisten, serta efisiensi biaya dan pengelolaan risiko yang *prudent* turut menjadi faktor pendukung dalam menjaga stabilitas permodalan Bank.

h. Penguatan Budaya Sadar Risiko dan Strategi Anti Fraud

Direksi memperkuat budaya sadar risiko di seluruh jenjang organisasi serta mengimplementasikan strategi anti Fraud secara efektif melalui peningkatan kualitas sistem pengendalian internal, pemisahan fungsi, serta optimalisasi mekanisme pengawasan pelanggaran (*whistleblowing system*). Direksi juga memastikan bahwa seluruh pegawai memahami dan menerapkan prinsip pengendalian risiko dalam setiap aktivitas operasional. Realisasi penerapan budaya sadar risiko dan pelaksanaan Strategi Anti Fraud tercermin dari tidak ada kasus materi penipuan, implementasi pemisahan tugas yang jelas dan dikuatkan melalui dual control, tingkat pelaporan WBS nihil, dan pelaksanaan program kesadaran risiko ≥ 2 kali/tahun.

i. Persiapan Rencana Aksi Peleburan

Direksi mempersiapkan rencana aksi konsolidasi melalui skema peleburan secara komprehensif dan terintegrasi, termasuk penyusunan dokumen pendukung, harmonisasi kebijakan dan proses bisnis, serta koordinasi intensif dengan regulator, dengan tetap memperhatikan aspek mitigasi risiko dan prinsip kehati-hatian. Direksi memastikan bahwa seluruh tahapan pelaksanaan peleburan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan tetap memperhatikan aspek mitigasi risiko, perlindungan konsumen, dan kesinambungan operasional Bank. Realisasi terhadap kesiapan pelaksanaan peleburan secara komprehensif tercermin dari penyelesaian dokumen peleburan 100% sesuai timeline, persetujuan regulator sesuai jalur, kemajuan integrasi kebijakan dan sistem 50% sesuai roadmap, jumlah isu kritical dalam proses integrasi dalam kondisi stabil (*zero mayor issue*) namun masih perlu memperhatikan persiapan teknis termasuk mewujudkan budaya kerja melalui sosialisasi satu visi misi BPR hasil peleburan.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	Nama	: Iskandar Itan
	Jabatan	: Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	: <ol style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independent. b. Melaksanakan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian. c. Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bank. d. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan tata kelola pada seluruh kegiatan usaha atau tingkat organisasi sesuai dengan skala, volume serta kompleksitas usaha Bank. e. Tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait, dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar Bank dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan. f. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. g. Melakukan rapat Dewan Komisaris untuk melakukan evaluasi ataupun membahas hal-hal yang bersifat urgent.
2	Nama	: Edy Saputra
	Jabatan	: Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab	: <ol style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen. b. Melaksanakan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian. c. Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bank. d. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan tata kelola pada seluruh kegiatan usaha atau tingkat organisasi sesuai dengan skala, volume serta kompleksitas usaha Bank. e. Tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait, dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar

	<p>Bank dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.</p> <p>f. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.</p> <p>g. Melakukan rapat Dewan Komisaris untuk melakukan evaluasi ataupun membahas hal-hal yang bersifat <i>urgent</i>.</p>
<p>Rekomendasi dari Dewan Komisaris kepada Direksi disampaikan melalui Rapat Direksi dan Dewan Komisaris dan dituangkan dalam Risalah Rapat. Adapun yang menjadi rekomendasi dari Dewan Komisaris kepada Direksi adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Direksi perlu memperkuat penerapan manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit, serta meningkatkan monitoring dan diversifikasi sektor pembiayaan guna menjaga kualitas aset,</p> <p>b. Direksi perlu memastikan implementasi program APU, PPT, dan PPPSPM berjalan efektif melalui pemantauan transaksi mencurigakan, pengkinian data nasabah, serta peningkatan kesadaran kepatuhan pegawai,</p> <p>c. Direksi perlu memperkuat penerapan tata kelola perusahaan yang baik melalui peningkatan integritas pelaporan keuangan, penyesuaian struktur organisasi sesuai ketentuan, serta pembaruan kebijakan internal,</p> <p>d. Direksi perlu memastikan seluruh temuan audit ditindaklanjuti secara tepat waktu dan tuntas sesuai dengan ketentuan yang berlaku,</p> <p>e. Direksi perlu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui program pendidikan dan pelatihan yang terstruktur dan berbasis kebutuhan organisasi,</p> <p>f. Direksi perlu menyusun dan melaksanakan strategi bisnis yang seimbang antara pertumbuhan kredit, kualitas aset, dan penguatan likuiditas dengan mengacu pada RBB berbasis risiko,</p> <p>g. Direksi perlu mengoptimalkan penyelesaian aset yang diambil alih (AYDA) secara akuntabel dan sesuai regulasi guna meminimalisir risiko penurunan nilai aset dan dampak terhadap permodalan,</p> <p>h. Direksi perlu memperkuat budaya sadar risiko dan implementasi strategi anti fraud melalui optimalisasi sistem pengendalian internal dan whistleblowing system,</p> <p>i. Direksi perlu mempersiapkan rencana aksi konsolidasi/peleburan secara komprehensif dengan memperhatikan mitigasi risiko, kesiapan operasional, serta kepentingan pemegang saham.</p>	

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR, dengan modal inti yang dimiliki BPR Kepri Batam belum memiliki kewajiban untuk membentuk Komite.

a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -
2	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -

3	Komite Remunerasi dan Nominasi	
	Tugas dan Tanggung Jawab	: -
	Program Kerja	: -
	Realisasi	: -
	Program Kerja	: -
	Realisasi	: -
4	Komite Manajemen Risiko	
	Tugas dan Tanggung Jawab	: -
	Program Kerja	: -
	Realisasi	: -
5	Komite Lainnya	
	Tugas dan Tanggung Jawab	: -
	Program Kerja	: -
	Realisasi	: -
	Jumlah Rapat	: -

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No	Nama	Keahlian	Komite					Pihak Independen (Ya/Tidak)
			Audit	Pantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	Manajemen Risiko	Lain-nya	
-	-	-	-	-	-	-	-	-

D. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	Medi	Tidak Ada	00.00	Tidak Ada	00.00
2	Elisabet	Tidak Ada	00.00	Tidak Ada	00.00

* Seluruh anggota Direksi tidak memiliki saham pada BPR Kepri Batam.

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	Iskandar Itan	Tidak Ada	00.00	Tidak Ada	00.00
2	Edy Saputra	Tidak Ada	00.00	Tidak Ada	00.00

* Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham pada BPR Kepri Batam.

E. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Medi	-	Tidak Ada	00.00
2	Elisabet	-	Tidak Ada	00.00

* Seluruh anggota Direksi tidak memiliki saham pada Perusahaan lain.

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Iskandar Itan	-	Tidak Ada	00.00
2	Edy Saputra	601118	PT. BPR Dana Nusantara	10.00
3	Edy Saputra	-	PT. Graha Cipta Dana	10.00
4	Edy Saputra	-	PT. Suryo Mandiri Sejati Abadi	20.00
5	Edy Saputra	-	PT. Sumber Tani Mandiri	12.50

F. Hubungan Keuangan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Medi	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Elisabet	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

* Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan sesama anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham.

2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Iskandar Itan	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Edy Saputra	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada

* Edy Saputra selaku Komisaris PT. BPR Kepri Batam merupakan pemegang saham sebesar 10% di PT. Graha Cipta Dana yang merupakan Pemegang Saham Pengendali PT. BPR Kepri Batam.

G. Hubungan Keluarga Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Medi	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Elisabet	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

* Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham.

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Iskandar Itan	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Edy Saputra	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

* Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham.

H. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	Rp. 1.347.399.200	2	Rp. 726.494.600
2	Tunjangan	2	Rp. 138.666.750	2	Rp. 78.862.850
3	Tantiem	2	Rp. 388.192.150	2	Rp. 149.984.200
4	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
5	Remunerasi lainnya	0	0	0	0
Total Remunerasi			Rp. 1.874.258.100		Rp. 955.341.650
Jenis Fasilitas Lain					
1	Perumahan	0	0	0	0
2	Transportasi	0	Rp. 96.600.000	0	0
3	Asuransi Kesehatan	2	Rp. 11.520.000	0	0
4	Fasilitas Lainnya	0	0	0	0
Total Fasilitas Lain			Rp. 108.120.000		0
Total Remunerasi dan Fasilitas Lain			Rp. 1.982.378.100		Rp. 955.341.650

I. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan	Perbandingan
	(a/b)
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	4.78
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.59
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.61
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1.71
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	2.37

J. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris dalam 1 (satu) Tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	19 Februari 2025	2	Rapat Dewan Komisaris a. Penerapan APU, PPT dan PPPSPM, b. Pendidikan dan pelatihan SDM BPR, c. Sosialisasi Internal, d. Penerapan prinsip kehati-hatian, e. Implementasi RBB, f. Tindak lanjut temuan-temuan Audit, baik Audit Internal, Eksternal, maupun Otoritas yang berkaitan, g. Penerapan integritas pelaporan keuangan, serta h. Pembahasan lainnya.
2	19 Februari 2025	4	Rapat Dewan Komisaris dan Direksi a. Evaluasi kinerja BPR, b. Penerapan APU, PPT dan PPPSPM, c. Rencana aksi konsolidasi BPR, d. Penerapan SAF, e. Penerapan prinsip kehati-hatian dan budaya manajemen risiko, f. Isu strategis dan evaluasi kebijakan, g. Pendidikan dan pelatihan SDM BPR, h. Tindak lanjut temuan-temuan Audit, baik Audit Internal, Eksternal, maupun Otoritas yang berkaitan, serta i. Pembahasan lainnya.
3	20 Mei 2025	2	Rapat Dewan Komisaris a. Evaluasi kinerja BPR, b. Evaluasi penerapan manajemen risiko, kepatuhan dan pengendalian internal, c. Evaluasi Implementasi penerapan APU, PPT dan Tata kelola perusahaan, serta d. Pembahasan lainnya.
4	20 Mei 2025	4	Rapat Dewan Komisaris dan Direksi a. Pencapaian kinerja bank, b. Pelaksanaan APU, PPT dan PPPSPM, c. Penerapan Tata kelola, d. Realisasi RBB, e. Tindak lanjut temuan-temuan Audit, baik Audit Internal, Eksternal, maupun Otoritas yang berkaitan, f. Penerapan prinsip kehati-hatian dan budaya manajemen risiko, g. Persiapan rencana aksi konsolidasi, serta h. Pembahasan lainnya.

5	22 Agustus 2025	2	Rapat Dewan Komisaris a. Evaluasi kinerja BPR, b. Tindak lanjut temuan-temuan Audit, baik Audit Internal, Eksternal, maupun Otoritas yang berkaitan, c. Pengawasan pelaksanaan APU, PPT dan Manajemen Risiko, d. Peningkatan penerapan kepatuhan, e. Progress konsolidasi, serta f. Pembahasan lainnya.
6	22 Agustus 2025	4	Rapat Dewan Komisaris dan Direksi a. Evaluasi pencapaian kinerja BPR, b. Persiapan BPR konsolidasi, c. Realisasi pendidikan dan pelatihan tahun 2025, d. Peningkatan penerapan kepatuhan terhadap APU, PPT dan PPPSPM, e. Tindak lanjut temuan-temuan Audit, baik Audit Internal, Eksternal, maupun Otoritas yang berkaitan, serta f. Pembahasan lainnya.
7	05 Desember 2025	2	Rapat Dewan Komisaris a. Evaluasi kinerja BPR, b. Penyusunan RBB tahun 2026 dan Realisasi RBB tahun 2025, c. Implementasi penerapan APU, PPT dan PPPSPM, d. Pengawasan terhadap Penerapan Manajemen Risiko, e. Penerapan Strategi Anti Fraud, f. Isu strategis dan evaluasi kebijakan, serta g. Pembahasan lainnya.
8	05 Desember 2025	4	Rapat Dewan Komisaris dan Direksi a. Pencapaian kinerja BPR, b. Penyusunan RBB tahun 2026, c. Penerapan APU, PPT dan PPPSPM, d. Budaya sadar risiko dan pengendalian Fraud melalui penerapan Strategi Anti Fraud, e. Kebijakan remunerasi dan nominasi sesuai amanat POJK Tata kelola, f. Evaluasi kebijakan internal BPR, g. Tindak lanjut temuan-temuan Audit, baik Audit Internal, Eksternal, maupun Otoritas yang berkaitan, serta h. Pembahasan lainnya.

K. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Iskandar Itan	8	0	100%
2	Edy Saputra	8	0	100%

L. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

* Selama Tahun 2025, tidak terdapat penyimpangan internal pada BPR Kepri Batam.

M. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0

* Selama Tahun 2025 tidak terdapat permasalahan hukum yang dihadapi oleh BPR Kepri Batam.

N. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	NIK	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan			
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Pada periode tahun 2025 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

O. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Lain

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	12 Desember 2025	Kegiatan Sosial	Bantuan Sosial Kepri Berbakti Tahun 2025	Panti Asuhan Agape Batam	Rp. 2.000.000

P. Penutup

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Kepri Batam Tahun 2025 ini disusun sebagai implementasi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan *stakeholders* guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Kepri Batam. Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola BPR ini juga diharapkan dapat menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan *stakeholders*, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan sesuai sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang optimal.